



Buletin

Parlementaria

Nomor 1018/V/VII/2018 • Juli 2018



The House of Representatives
Republic of Indonesia



DPR Komitmen Jaga Kedaulatan Kawasan Pasifik

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



9 772614 339005

IPPP, Terobosan Penting Diplomasi Kawasan Pasifik

INDONESIA – PACIFIC PARLIAMENTARY PARTNERSHIP

HUMAN DEVELOPMENT AND MARITIME SUSTAINABILITY

23 – 24 July 2018 | Grand Hyatt, Jakarta – Indonesia



Wapres RI, Pimpinan DPR RI, Pimpinan BKSAP DPR RI, dan Pimpinan Parlemen dari 14 negara di Kawasan Pasifik menghadiri forum IPPP di Jakarta

DPR Komitmen Jaga Kedaulatan Kawasan Pasifik

Kegiatan Indonesia - Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, 23-24 Juli 2018, menjadi forum DPR RI untuk menginisiasi dan menjaga kedaulatan di Kawasan Pasifik. Pertemuan yang sangat fundamental dan baru pertama kalinya dilakukan antara DPR RI dengan parlemen negara-negara kepulauan di Kawasan Pasifik ini merupakan sinergitas antara DPR RI dan pemerintah untuk ikut serta dalam mempertahankan perdamaian, keamanan, meningkatkan pembangunan ekonomi dan konektivitas di Kawasan Pasifik, termasuk Kawasan Timur Indonesia.

Forum yang mengambil tema *'Human Development and Maritime Sustainability'* itu turut dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla yang bertindak sebagai keynote speaker, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, serta sejumlah Anggota DPR RI lainnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan sambutan pada Pembukaan IPPP di Jakarta, Senin (23/7) mengatakan, letak geografis Indonesia yang berada di posisi silang diantara dua benua dan samudera, yakni Samudera Hindia dan Pasifik mengharuskan Indonesia berinteraksi dengan negara-negara tetangga, termasuk yang terletak di Kawasan Pasifik.

Indonesia selama ini terlibat dalam peningkatan hubungan negara pasifik melalui berbagai kerangka multilateral seperti, PBB, Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI), APEC, Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Grup Melanesia (MSG), Forum Pembangunan Kepulauan Pasifik (PIDF) dan lainnya. Namun, belum ada kemitraan khusus antara Indonesia dan negara-negara Pasifik.

Menyadari pentingnya parlemen dalam jalur diplomasi, Indonesia dan negara Pasifik perlu membentuk suatu kemitraan untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan mencegah konflik yang dapat mengancam kedaulatan wilayah, termasuk isu Papua yang kerap kali digaungkan untuk mengancam kedaulatan NKRI. Karenanya, dukungan negara-negara Pasifik juga memiliki peran penting sebagai kekuatan pendukung Indonesia di forum internasional, seperti PBB.

"Realitas menunjukkan bahwa negara-negara di Kawasan Pasifik ini tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam dan keberagaman latar belakang Sumber Daya Manusia, termasuk ras, tetapi juga kesamaan dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya," tutur politisi Partai Golkar itu.

Karena itu, sebagai negara kepulauan, IPPP akan mengangkat isu-isu pembangunan di bidang

kelautan, kemaritiman, dan pembangunan SDM menjadi fokus bersama Indonesia dan negara-negara yang berada di Kawasan Pasifik. Bamsoet optimis penyelenggaraan IPPP akan menghasilkan kemitraan yang lebih luas. Sehingga membuat Indonesia dan negara-negara di Kawasan Pasifik dapat saling memahami dan menumbuhkan kepercayaan bersama.

"Sebagai negara yang bertetangga dan berada di kawasan laut yang sama, adalah sebuah keniscayaan apabila kita mutlak menjalin dan memelihara hubungan baik dalam kemitraan yang kuat dan berkelanjutan. Sehingga kita bisa berkontribusi bagi upaya mewujudkan harmoni dan perdamaian di kawasan," pungkash Bamsoet.

Hal senada diungkapkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat menyampaikan pidatonya. Menurutnya, negara-negara Pasifik tidak bisa mengatasi tantangan pembangunan manusia dan maritim berkelanjutan jika berdiri sendiri, sebab itu

dibutuhkan hubungan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan. Sama seperti Pasifik yang berarti teduh, diharapkan kemitraan ini dapat memberikan kedamaian dan ketenangan bersama untuk membangun Kawasan Pasifik lebih maju.

"Banyak yang mengartikan laut memisahkan kita. Padahal Pasifik menghubungkan kita satu sama lain. Karena itu masalah yang terjadi di pasifik, adalah masalah di negara pasifik lainnya," tandas orang nomor dua RI ini.

Selama sidang berlangsung, delegasi dari negara Pasifik menyambut baik inisiasi Indonesia dan sudah cukup lama menunggu forum semacam ini, karena sangat menghargai peran Indonesia di tingkat global dan kawasan. Indonesia bahkan diharapkan dapat menjadi pemimpin untuk membentuk kemitraan yang lebih kuat di masa depan.

Delegasi IPPP berpandangan, adanya kesamaan historik dan kepentingan bersama mendorong negara-negara Pasifik untuk melakukan kerja sama. Beberapa yang telah disepakati, diantaranya: meningkatkan konektivitas regional untuk pertumbuhan ekonomi dengan menegakkan prinsip non-intervensi dalam urusan internal masing-masing negara.

Di bidang kemaritiman, semua delegasi sepakat mempromosikan potensi ekonomi biru untuk memastikan pengembangan sumber daya laut yang berkelanjutan, meningkatkan keamanan di kawasan dan pengembangan peran perempuan dan anak di kawasan.

Pimpinan Parlemen dari berbagai negara Kawasan Pasifik yang hadir, antara lain Wesley W. Simina (Ketua Kongres Mikronesia), Jiko Luveni (Ketua Parlemen Republik Fiji), Tebuai Uaai (Ketua Parlemen Republik Kiribati), Cyril Buraman (Ketua Parlemen Republik Nauru), dan Kenneth A. Kedi (Ketua Parlemen Republik Kepulauan Marshall).

Kemudian, Japsper Nasiu (Ketua Parlemen Kepulauan Solomon), Fatafehi Fakafanua (Ketua Parlemen Kerajaan Tonga), Gaston Tong Sang (Ketua Parlemen French Polynesia), John Simon (Wakil Ketua Parlemen Papua Nugini), Lecourieux Yoann (Wakil Ketua Parlemen New Caledonia). ■ **tim/sf**

Foto: Kresno/hr



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Sofyan Efendi
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,
Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, GERALDI Opie
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
DESAIN GRAFIS
Dito Sugito
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Ketua Tim Diplomasi Parlemen Indonesia Fadli Zon (tengah), bersama Ketua BKSAP DPR RI dan Anggota DPR RI memberikan keterangan pers terkait IPPP 2018

Foto: Kresno/hr

IPPP, Terobosan Penting Diplomasi Kawasan Pasifik

Indonesia - Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), untuk pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta, 23-24 Juli 2018. Forum ini merupakan inisiatif sekaligus terobosan penting diplomasi parlemen untuk mendukung kepentingan Indonesia di tengah-tengah negara tetangga di Kawasan Pasifik.

Demikian disampaikan Ketua Tim Diplomasi Parlemen Indonesia yang juga Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dalam pembukaan IPPP 2018, di Jakarta, Senin (23/7). IPPP 2018 mengusung tema '*Human Development and Maritime Sustainability*' dan dihadiri oleh parlemen dari 14 negara di Kawasan Pasifik. Fadli menjadi ketua sidang pertama didampingi Ketua Parlemen Fiji Dr. Jiko Luveni.

Fadli menjelaskan, meski secara geografis berdekatan, berada di

tengah lautan yang sama, selain kerja sama bilateral, selama ini Indonesia belum memiliki forum khusus dalam berhubungan dengan negara-negara Pasifik yang bertetangga langsung.

Kerja sama parlemen dengan negara-negara Pasifik hanya melalui perantara sejumlah forum internasional dan regional, seperti (Inter-Parliamentary Union) IPU, ataupun Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF). Namun, forum tersebut terlalu luas, dan anggotanya terlalu banyak, sementara kebutuhan kerja sama antara

Indonesia dengan sejumlah negara Pasifik sangat spesifik.

Itu sebabnya, politisi Partai Gerindra itu menilai, IPPP merupakan sebuah terobosan penting. Mengingat negara-negara Pasifik umumnya menganut sistem parlementer, tentu diplomasi parlemen perlu mengambil peranan penting di dalamnya. Jadi, bukan tanpa alasan ketika inisiatif lahirnya forum ini berasal dari DPR RI.

Indonesia menganggap negara-negara Pasifik sebagai mitra penting, bukan hanya karena kedekatan geografis, tetapi juga dalam hal potensi yang dimiliki bersama untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari 14 negara yang hadir, semua negara sepakat lautan tak seharusnya dijadikan tembok pemisah, melainkan seharusnya dijadikan alat pemersatu. Indonesia, bersama dengan tetangga-tetangganya di Pasifik, merupakan satu benua biru, sebuah benua maritim. Itu sebabnya tema pembangunan manusia dan maritim dijadikan tema IPPP. Bagaimanapun, perekonomian Indonesia dan negara-negara Pasifik memang

14 Negara Pasifik Hadiri Forum IPPP

Sebanyak 14 negara di Kawasan Pasifik menghadiri forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainability yang digelar di Jakarta, 23-24 Juli 2018). Pertemuan ini merupakan forum kemitraan parlemen baru antara Indonesia dan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik.



Foto: Singgih/hr

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dalam Pembukaan IPPP 2018 di Jakarta

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, IPPP merupakan inisiatif DPR RI dalam mencari terobosan baru untuk mengembangkan kerja sama kemitraan di berbagai bidang, khususnya ekonomi, dengan negara-negara di Kawasan Pasifik.

“Agenda IPPP ini untuk mempererat hubungan diplomasi antara Parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik. Alhamdulillah, dari 16 negara ada 14 negara yang hadir dan 9 Ketua DPR,” ungkap Nurhayati, usai memberikan sambutan pada gala *dinner*, sebagai simbol penyambutan kepada seluruh delegasi, di Jakarta, Minggu (22/7) malam.

Ke-14 negara tersebut adalah Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Republik Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru.

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, sidang yang mengangkat tema tentang pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan maritim ini merupakan momentum bersejarah karena pertama kalinya bagi Indonesia dan negara-negara pasifik saling bertemu guna mempererat konektivitas.

“Tadi sudah dilakukan beberapa pertemuan bilateral. Mereka mengatakan sangat berterima kasih atas keramatahman masyarakat Indonesia. Kita semua sepakat hubungan yang sudah dekat ini perlu ditingkatkan lagi,” papar Nurhayati.

Di sisi lain ia menambahkan, melalui forum ini diharapkan negara-negara Pasifik dapat mengenal lebih jauh budaya serta karakteristik bangsa Indonesia yang begitu beragam. Sama seperti negara Pasifik, Indonesia juga memiliki masyarakat yang berasal dari rumpun Melanesia dan Polynesia.

“Hal-hal seperti ini perlu juga kita kenalkan supaya mereka memahami bahwa inilah Indonesia. Kita adalah negara kesatuan republik yang berdaulat dan tidak pernah membedakan suku maupun etnis. Itu kita tekankan dan mereka sangat terbuka, bisa dirasakan dari *welcome dinner* malam ini. Mereka begitu menyatu dan merasa berada di daerah mereka sendiri,” tandas Nurhayati. ■ tim/sf

sangat terikat dan tergantung pada ‘Blue Economy’.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki potensi ekonomi dan sumber daya laut yang tak tertandingi. Namun, potensi tersebut juga datang dengan tantangan, seperti perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, meningkatnya limbah plastik, yang semuanya perlu diatasi. Semua negara Pasifik yang hadir berpandangan masalah-masalah tadi akan lebih mudah diatasi jika ada kemitraan di kawasan,” terang Fadli.

Fadli menambahkan, hampir semua delegasi dari negara yang hadir menyampaikan forum ini sebenarnya terlambat. Artinya, sebagai negara besar, Indonesia seharusnya sudah sejak lama menjadi inisiator forum kerja sama seperti ini. Semua negara sebenarnya sudah lama memimpikan ada forum kerja sama semacam ini dengan Indonesia, yang mereka sebut sebagai ‘kakak’.

“Mewakili DPR, saya merasa senang sekali atas pujian tersebut. Apalagi, pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, sangat antusias dan

berterima kasih atas inisiatif DPR ini,” papar Fadli.

Ia pun berharap, forum ini tak berhenti hanya di sini, di level strategis semata. Forum ini harus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang dan ditindaklanjuti oleh berbagai kerja sama yang lebih teknis.

“Sekali lagi, ini adalah sumbangan diplomasi parlemen untuk mendukung kepentingan diplomasi Indonesia di tengah-tengah negara Pasifik yang bertetangga,” tandas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu. ■ tim/sf

Komisi IV Apresiasi Penjelasan Gubernur Kalteng

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengapresiasi penjelasan Gubernur Kalimantan Tengah terkait upaya penanggulangan perambahan kawasan hutan. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Tengah Sugiyanto Sabran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

“Kami mengapresiasi penjelasan Gubernur Kalimantan Tengah sehubungan dengan upaya penanggulangan perambahan kawasan hutan. Serta mendukung upaya penindakan secara tegas terhadap perusahaan pengguna kawasan hutan yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Juga memberikan sanksi sampai dengan pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membangun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat di sekitar kebun,” ujar Daniel.

Pada kesempatan itu, Daniel menyebut salah satu perusahaan di Kalteng, PT. Best Agro Group yang sebelumnya sempat



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan

mendapat teguran karena belum juga menjalankan kewajibannya membangun 20 persen plasma dari total kebun yang dimilikinya. Jika teguran itu tidak diindahkan, menurutnya izin perusahaan sebaiknya dicabut.

“Kalau tidak ada niat baik dari PT. Best untuk menyediakan plasma, saran saya dicabut saja izinnya, lahannya diambil kembali. Karena kami pernah saksikan sendiri saat kunjungan kerja yang lalu. Jadi, kami dukung bapak untuk melakukan itu,” ucap politisi PKB ini.

Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugiyanto Sabran menjelaskan, di Kalteng ada lebih dari sejuta hektar luas total izin usaha pertambangan (IUP). Sedangkan luas wilayah pertambahan rakyat sebesar lebih dari 128 ribu hektar. Sementara jumlah IUP yang lebih namun yang serius dalam hal perizinan itu tidak sampai separuhnya, yakni hanya 437 IUP saja yang sudah *clean and clear*.

“Berbagai upaya telah kami lakukan untuk penanggulangan perambahan kawasan hutan. Diantaranya kegiatan patroli dan operasi pengamanan hutan, peningkatan peran UPT-KPH dalam pengawasan dan sosialisasi di wilayahnya, serta memproses permohonan rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk skema PP 60/PP 104,” papar Sugiyanto. ■ ayu/sf

Komisi III Dorong Aparat Tingkatkan Pengamanan Asian Games 2018

Komisi III DPR RI mendorong aparat, dalam hal ini Polri dan TNI untuk meningkatkan pengamanan selama pelaksanaan Asian Games 2018 yang dibuka pada 18 Agustus 2018 mendatang. Harapannya, dengan pengamanan yang maksimal, pelaksanaan Asian Games bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan bersama seluruh pihak.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI bertemu dengan Kapolda Jawa Barat Agung Budi Maryoto, Kakanwil BNNP Jawa Barat Rusnadi, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal di aula Polda Jawa Barat, Bandung, Jumat (20/7).

“Asian Games adalah agenda negara yang harus kita jaga bersama. Semua unsur dan institusi harus bekerjasama untuk agenda Asian Games berjalan dengan sukses,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Erma menuturkan bahwa ada empat cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Provinsi Jawa Barat dan harus menjadi perhatian serius dalam

pengamanan demi mensukseskan Asian Games tahun ini.

Lebih lanjut politisi dari dapil Kalimantan Barat ini juga mengapresiasi kinerja Polda Jawa Barat yang terus melakukan cipta kondisi untuk memberantas kejahatan di Jabar. Bahkan sudah ada poin-poin pengawasan, dan *command center* yang akan dibentuk.

“Saya yakin dengan kerja yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolda ini berjalan baik, terbukti dengan pengamanan pilkada dan juga mudik lebaran berjalan lancar, semoga kondisi Asian Games bisa berlangsung dengan sukses aman dan damai,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Provinsi Jawa Barat Agung Budi

Banyak Picu Konflik, Perlu Dibentuk Pengadilan Pertanahan

Urgensi pembentukan Pengadilan Pertanahan mengemuka saat Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar Hukum Agraria dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan.



Foto: Arief/hr

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh

Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh menjelaskan perlunya pembentukan Pengadilan Pertanahan menurut para ahli

disebabkan karena banyaknya putusan pengadilan tentang masalah pertanahan bukan menyelesaikan masalah malah memicu konflik.

“Maka, dalam RUUP diperkenalkan lembaga penyelesaian sengketa berupa pengadilan pertanahan yang secara implisit dimaksudkan untuk menangani sengketa pertanahan yang saat ini merupakan kompetensi Pengadilan Negeri (PN),” jelasnya saat memimpin RDPU dengan Pakar Hukum Agraria, diantaranya, Suriyaman Mustari, Prof Nurhasan Ismail dan Kurnia Warman di Gedung DPR, Rabu (19/7).

Lebih lanjut, Nini sapaan akrab Nihayatul mengatakan, RUU pertanahan juga harus menjadi penguat terhadap UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini banyak

melenceng dari UUPA.

“Para pakar juga menemukan fakta bahwa ada beberapa pasal dalam RUU pertanahan yang melemahkan UUPA,” jelasnya. Selanjutnya, mereka juga mengatakan mengenai inkonsisten dan multitafsir dalam Pasal 27 RUU Pertanahan perlu dicermati.

“Penentu Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan swasta dan BUMN itu 10ribu, dulu disepakati begitu. Karena tingkat penguasaan tanah sangat tinggi, kesenjangan kepemilikan tanah sangat besar saat ini,” jelasnya.

Kemudian, mengenai hak pengelolaan tanah pertanian, ada penetapan tanah untuk pertanian dan harus dipertahankan. “RUU ini perlu menegaskan penetapan tanah ulayat, bukan hanya mengakui karena sudah ada di UUPA,” tuturnya.

Para pakar pertanahan juga menilai perlunya pembentukan Bank Tanah, untuk memenuhi hak tanah untuk kelas menengah ke bawah. Sekaligus mengontrol harga tanah. ■ ria/mp

Maryoto mengatakan bahwa Polda Jawa Barat dengan instansi terkait termasuk dibantu TNI dan semua stakeholder berkomitmen untuk bisa mengamankan dan mensukseskan Asian Games.

Kapolda Jabar mengatakan bahwa untuk sekarang ini, Polda Jabar lebih kepada operasi cipta kondisi terutama kepada kegiatan kejahatan jalan yang sudah mengamankan setidaknya 4836 orang.

“Dalam kurun waktu dua minggu kita telah menangkap ada 4836 orang yang terindikasi, dan yang sudah kita tindak lanjut dengan alat bukti mencapai 252 orang,” tutupnya. ■ azk/sf



Foto: Azka/hr

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir (tengah) saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI meninjau BUMDes Desa Ngroto, Malang

Foto: Sofyan/hr

Masyarakat Desa Ngroto Sadar Pentingnya Pengembangan Desa

Desa Ngroto di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur menjadi desa terbaik atau nomor satu di seluruh Indonesia. Desa tersebut masuk dalam 100 desa terbaik indeks desa membangun (IDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dengan adanya prestasi ini, masyarakat Desa Ngroto dinilai sadar akan pentingnya pembangunan dan pengembangan desa.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Desa Ngroto, Pujon, Kabupaten Malang, Jatim, Jumat (20/7). Dalam kunjungan ke BUMDes Desa Ngroto dan pertemuan dengan aparatur dan masyarakat Desa Ngroto itu, Tim Komisi V DPR RI didampingi Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU) Kemendes PDTT Johozua M. Yoltuwu.

“Saya kira pemenang IDM ini, dari segi kesadaran warga untuk menghadapi perkembangan sudah makin bagus. Dan terbukti kesadaran mereka untuk menopang perkembangan BUMDes cukup banyak. Mereka juga sudah mulai membangun wisata. Proses sosialisasi dilakukan oleh masyarakat Desa Ngroto melalui media sosial, itu gambaran kesadaran masyarakat terhadap pertumbuhan dan perkembangan desa melalui usaha dan BUMDes. Saya kira pantas kalau Desa Ngroto ini mendapatkan juara satu,” puji Ibnu.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, berbagai kegiatan yang

dilakukan oleh Desa Ngroto ini sudah sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Undang-Undang Desa. Namun menurutnya ada potensi yang bisa lebih dikembangkan di Desa Ngroto ini. Seperti adanya variasi usaha, sehingga potensi yang ada di desa tersebut bisa menjadi aset yang bisa dikelola dengan pendekatan usaha. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta juga dimungkinkan dalam pengembangan BUMDes di Desa Ngroto ini.

“Bagi kita, desa ini menjadi satu contoh, dan mudah-mudahan ini bisa bergulir ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Kalau ini terjadi, saya kira kita

bisa yakin bahwa pertumbuhan dari desa bisa menopang perkembangan kota. Dan apa yang direncanakan untuk mensejahterakan masyarakat secara merata dan konsep Presiden Jokowi untuk perkembangan Indonesia sentris itu bisa terwujud. Dan melalui pola itu, Komisi V akan mendukung itu,” optimis politisi dapil Sulawesi Barat itu.

Sebelumnya, Dirjen PPMK Kemendes PDTT Taufik Madjid menjelaskan, pada tahun 2018 ini pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp314 miliar untuk sejumlah wilayah di Kabupaten Malang. Beberapa daerah mendapatkan bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pembangunan embung, dan bantuan kepada 10 BUMDes. Total Dana Desa pun sudah disalurkan sebanyak 100 persen.

Sementara itu, Kepala Desa Ngroto Prayogi mengatakan, desa yang dipimpinnya memiliki banyak potensi. Salah satunya sumber mata air yang sangat besar sekali, sehingga perlu pengelolaan untuk wisata dan kepentingan pertanian. Pertanian itu nantinya juga direncanakan untuk konsep wisata. Namun ia mengakui, masih perlunya bantuan dan pembinaan dari pemerintah untuk mengembangkan Desa Ngroto ini.

“Kendala yang kami rasakan sementara ini anggaran belum mencakup sampai ke sana. Sehingga kami untuk bidang perekonomian, masih banyak sekali perlu dukungan, walaupun kami IDM-nya nilai 94. Melalui BUMDes Desa Ngroto, kami masih butuh bantuan pembinaan seperti peningkatan kapasitasnya, pengelolaan manajemennya, dan dasar hukumnya seperti apa. Harapan kami ada sinergitas, karena BUMDes ini untuk peningkatan perekonomian masyarakat,” jelas Prayogi.

Kunjungan kerja ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi V DPR RI diantaranya Henky Kurniadi (F-PDI Perjuangan), Sadarestuwati (F-PDI Perjuangan), Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra), Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra), Bahrum Daido (F-Demokrat), Willem Wandik (F-Demokrat), Jhon Siffy Mirin (F-PAN), Nur Yasin (F-PKB), dan Unais Ali Hisyam (F-PKB). ■ sf

Desa Karya Makmur Bangka Layak Jadi Percontohan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno mengapresiasi Desa Karya Makmur, Kabupaten Bangka dalam mengelola Dana Desa. Menurutnya, desa tersebut layak menjadi percontohan sehingga manfaat dana desa bisa dirasakan masyarakat.

Demikian diungkapkan Anton saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali, Provinsi Bangka Belitung bersama dengan jajaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jumat (20/7). Rombongan diterima langsung Wakil Bupati Bangka Rustamsyah.

“Desa Karya Makmur sudah sangat baik, ada harapan juga apa yang sudah dilakukan dapat menjadi contoh dan teladan bagi desa lain. Ini merupakan contoh yang terbaik, juara 3 di tingkat provinsi dan juara 1 di kabupaten,” kata Anton.

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Karya Makmur bisa menjadi percontohan dan teladan bagi desa di kabupaten lainnya. “Di sini BUMDesnya itu ada 7 ruko yang disewakan. Artinya BUMDesnya berjalan. Sementara di tempat lain mungkin belum berjalan dengan optimal,” tuturnya.

Ia menambahkan, berdasarkan pengawasan Komisi V DPR RI saat meninjau lapangan dan menyerap aspirasi, salah satu kendala penggunaan Dana Desa maupun BUMDes tidak berjalan dengan baik adalah kurangnya pengalaman dan pendampingan bagi kepala desa. Mengingat tak sedikit kepala desa yang belum memiliki pengalaman di bidang usaha.

“Saya harap semua program yang bisa digunakan dengan Dana Desa bisa dilakukan, sehingga masyarakat desa juga bisa merasakan manfaatnya. Dengan adanya Dana Desa, jalan-jalan desa bisa diperbaiki, begitu juga dengan posyandu, sarana olahraga, BUMDes, embung, jadi banyak program yang bisa bersentuhan dengan masyarakat. Untuk masalah hukum, jangan sampai gara-gara Dana Desa turun, tetapi ada membawa permasalahan hukum kepada masyarakat atau kepala desa,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Karya Makmur Yusni Tamrin memaparkan penggunaan Dana Desa yang sudah diterima untuk Desa Karya Makmur. Menurutnya, kucuran Dana Desa tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pengolahan sampah, UMKM dan berbagai usaha yang sudah dilakukan melalui BUMDes. Karena itu, Desa Karya Makmur terpilih sebagai desa terbaik di kabupaten Bangka dalam penilaian lomba desa serta juara 3 lomba desa tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ■ ann/sf



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur Desa Karya Makmur, Bangka

Legislator Dorong KAI Tambah Rute Kereta Api

Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja mengatakan, terkait laporan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2018, ia mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menambah rute kereta api. Menurutnya, hal ini agar mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.



Foto: Jayadi/hr

Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja

kendaraan akan cukup besar jika angkutan massal seperti kereta api tidak menambahkan rute perjalanan.

“Menurut saya, angkutan massal seperti kereta api harus lebih mudah diakses. Saya sarankan rute kereta api ditambah, sehingga daya angkut akan besar, dan masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor,” kata Lili saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan

jajaran Sekretariat Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

Politisi Partai Golkar ini menggambarkan, data mobil penumpang pada tahun 2016 sudah 14 juta, sedangkan bus 2,5 juta, mobil barang 7 juta, kemudian sepeda motor 105 juta, sehingga volume

Komisi IX Dukung BNP2TKI Hadapi Hambatan Perlindungan Pekerja Migran

Komisi IX DPR RI akan terus mendukung Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam menghadapi hambatan-hambatan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf M Efendi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

“Kita memang sangat ingin sekali men-support BNP2TKI ini, dan hambatan-hambatan yang mentok, mungkin bisa kita carikan jalan keluar dengan berbagai rapat bersama dengan mitra-mitra yang lainnya. Mudah-mudahan kita mendapat solusi yang terbaik bagi pekerja-pekerja migran kita,” papar Dede.

Dalam rapat ini kedua belah pihak juga menyimpulkan, bahwa Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk meningkatkan capaian program penempatan dan



Foto: Azka/hr

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf M Efendi (kiri)

“Itu baru tahun 2016 saja. Sehingga walaupun secepat apapun pengaturan jalan yang dilakukan pada saat mudik, tentu tidak akan mengurangi kemacetan karena banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini yang menurut saya angkutan massal seperti kereta api harus lebih banyak,” paparnya.

Lebih lanjut terkait tenggelamnya kapal motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, pada Juni lalu, ia menyampaikan setiap korban yang tidak ditemukan harus diberikan asuransi yang sesuai, dan jangan sampai terabaikan.

“Bagaimana kelanjutannya untuk para korban yang masih belum ditemukan? Kalau misalnya tidak dilanjutkan lagi pencariannya dan sudah berhenti sampai di situ, para korban yang tidak ditemukan harus diberikan asuransi yang sesuai. Jangan sampai terabaikan,” tandas politisi dapil Jawa Barat itu. ■ **tn/sf**

perlindungan PMI dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, sehingga perlindungan PMI semakin maksimal.

Untuk mencari solusi mengatasi masalah perlindungan TKI yang ada di lintas batas negara, Komisi IX DPR RI akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI untuk mengagendakan Rapat Gabungan dengan BNP2TKI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Luar Negeri terkait perlindungan pekerja migran pelaut lintas bantas.

Mungkin bisa kita carikan jalan keluar dengan berbagai rapat bersama dengan mitra-mitra yang lainnya. Mudah-mudahan kita mendapat solusi yang terbaik bagi pekerja-pekerja migran kita

“Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat kerja gabungan bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI untuk membahas amanat Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2017 tentang PPMI dalam rangka meningkatkan penempatan dan perlindungan PMI,” jelas Dede. ■ **eko/sf**

RUU Peksos Jamin Kepastian Hukum

Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto menjelaskan, kehadiran Rancangan Undang-Undang Pekerja Sosial (RUU Peksos) sangat diperlukan, karena selama ini ada ketidakpastian hukum dan jaminan mereka. Dengan adanya RUU Peksos, maka status pekerja sosial akan jelas, termasuk jaminan hukum, sosial dan kesejahteraan hidupnya.

“Tidak *fair* jika para pekerja sosial menyalurkan dan melakukan berbagai kegiatan sosial dan membantu sesama, sementara yang bersangkutan hidupnya minim. Sesuai amanat UUD 45 untuk mewujudkan keadilan sosial, maknanya adalah memberi empati kepada yang mereka membutuhkan,” jelas Itet di sela-sela pembahasan RUU Peksos dalam Rapat Panja Komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengakui, pembahasan RUU Peksos baru dimulai lagi karena menunggu berbagai masukan, baik yang dihimpun dari para pemangku kepentingan termasuk para pakar serta hasil studi banding. Salah satu hal yang didapat dari studi banding Panja ke Rusia, para pekerja sosial di negara itu sangat profesional dan sangat dilindungi. Bahkan dana sosial langsung dipegang oleh Presidennya.

Selain itu, dalam persoalan peksos, perguruan tinggi ikut dilibatkan, sehingga speksos di sana memiliki kualifikasi yang memadai, termasuk ada psikolog atau ahli sesuai kualifikasinya. Namun di Indonesia, tidak ada perbedaan yang jelas antara peksos dan *volunteer*. Ini harus diluruskan, sehingga efektif dan kena sasaran.

“Inilah salah satu hal yang bisa diadopsi dalam RUU Peksos. Harus jelas peksos mana yang mampu menangani suatu kasus dan dilakukan secara profesional. Itu yang harus diatur dalam RUU Peksos ini,” tandas Itet.



Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto

Foto: Arief/hr

Dikatakannya bahwa dari studi banding itu bisa diadopsi beberapa hal untuk dimasukkan dalam RUU Peksos seperti persyaratan merekrut tenaga yang betul-betul profesional, ada psikolog, ahli hukum dan profesi lainnya. Tak kalah penting, peksos harus diatur dengan manajemen profesional serta mendapat honor yang memadai.

“Bagaimana mungkin mereka bisa mendampingi secara total korban masalah sosial, sementara kesejahteraannya minim. Dari laporan yang diterima ada peksos yang hanya terima honor Rp300 ribu per enam bulan. Hargalah mereka, sebab merekalah yang bisa mengangkat bangsa dari ini dari penderitaan dan kemiskinan,” kata politisi dapil Lampung ini. ■ **mp/sf**



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke PT. IMIP di Morowali, Sulteng

Komisi VII Dorong Pembaruan Iuran IPPKH

Komisi VII DPR RI menginginkan adanya aturan baru dalam hitungan iuran Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dilakukan PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP). Dengan adanya pembaruan besaran iuran, diharapkan dapat meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron saat memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau area reklamasi tambang PT. IMIP di Morowali, Sulteng, Jumat (20/7).

“Belum ada *updating* besaran royalti, harus didiskusikan terus karena untuk hitungan iuran IPPKH-nya itu jangka waktu yang lalu, dan tidak memperhitungkan keekonomisan dan harga terbaik saat ini. Sehingga sumber

daya terlalu murah untuk dikonversi menjadi *raw material* korporasi,” kata Herman.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, permasalahan ini menjadi hal yang harus didiskusikan, sehingga ada *win-win solution* dengan para pengusaha, supaya negara juga diuntungkan dengan keberadaan perusahaan tersebut.

Selain melihat langsung lokasi reklamasi di area tambang yang dikelola PT. Bintang Delapan Mineral, Tim Komisi VII DPR RI juga mengunjungi salah satu pabrik *smelter* dan melihat langsung proses peleburan ore (bijih) menjadi *nickel pig iron* (NPI) dan *stainless steel*.

Dalam dialog dengan Direksi PT.

IMIP, Anggota Komisi VII DPR RI Ahmad M. Ali juga mempertanyakan komitmen PT. IMIP untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal asal Morowali. Ia meminta PT IMIP untuk memberikan kuota khusus bagi siswasiswi asal Morowali untuk bisa diterima kuliah di Politeknik Industri Logam Morowali (PILM).

Menjawab pertanyaan tersebut, Chief Eksekutif Officer (CEO) PT. IMIP Alexander Barus menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen dan bersedia untuk membantu meningkatkan PAD Morowali. Namun hal itu terbentur undang-undang.

“Undang-undang menyatakan bahwa seluruh pajak dan royalti harus disetor ke kas negara. Nanti pemerintah pusat yang menyalurkannya kembali ke daerah dalam hal ini Morowali dan Sulawesi Tengah. Andai ada aturan yang membolehkan dan mengharuskan kami menyetor royalti dan pajak langsung ke kas Pemda Morowali, maka itu akan kami lakukan,” kata Alexander.

Mengenai penggunaan tenaga kerja, Alexander mengatakan pihaknya sangat memprioritaskan tenaga kerja asal Kabupaten Morowali dan Sulawesi Tengah, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

“Begitu komitmennya kami untuk menggunakan tenaga kerja lokal sampai-sampai semua jurusan di tingkat pendidikan strata satu kami terima. Bahkan, ijazah SMA pun kami terima,” kata Alexander.

Khusus penggunaan tenaga kerja lokal, PT. IMIP sejak delapan bulan terakhir membuka jalur khusus bagi calon karyawan yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Morowali. Program itu dilakukan atas permintaan Pemda Morowali.

Terkait permintaan kuota khusus bagi warga Kabupaten morowali dalam penerimaan mahasiswa baru di kampus PILM, Alexander mengatakan bahwa itu bukan merupakan kewenangan mereka. Pasalnya, kampus politeknik tersebut merupakan milik Kementerian Perindustrian.

“PT. IMIP hanya sebatas *support* saja. Misalnya kami membantu menyediakan peralatan di *workshop* dan tenaga pengajar di kampus politeknik itu. Selebihnya merupakan kewenangan dari Kementerian Perindustrian,” kata Alexander. ■ ran/sf

Produksi Batubara Menurun, PNBP Kalsel Turun



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir

Foto: Husen/hr

Produksi pertambangan seperti batubara di Kalimantan Selatan (Kalsel) sedang menurun. Perusahaan batubara setempat juga belum kembali meningkatkan produksinya. Akibatnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga ikut menurun.

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Banjarmasin, Kalsel, Jumat (20/7). Dari 2014 sampai 2018 PNBPN Kalsel dari sektor pertambangan terus merosot. Tercatat pada 2014 sekitar Rp734 miliar. Pada 2015 dan 2016 setoran PNBPN mencapai lebih Rp305 miliar. Sementara 2017 lebih Rp320 miliar dan 2018 Rp195 miliar.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir yang memimpin delegasi Komisi XI ini, mengatakan, Komisi XI sangat berkepentingan melihat sejauh mana PNBPN pertambangan di Kalsel ini bisa menyumbang untuk penerimaan negara. Seperti diketahui, Komisi XI sedang menyusun RUU PNBPN. “PNBPN adalah penyumbang kedua terbesar untuk pendapatan negara setelah pajak,” katanya dalam sambutan pembukanya.

Pada 2018 produksi batubara Kalsel belum tumbuh kembali. Namun, secara keseluruhan PNBPN Kalsel dari berbagai sektor yang disumbang ke pemerintah pusat dan masuk kas negara mencapai Rp1,5 triliun. Namun, piutang PNBPN-nya juga cukup tinggi mencapai sekitar Rp3 triliun. Menurut Hafisz, PNBPN yang paling tinggi di Kalsel adalah dari sektor perkebunan dan pertambangan.

“Seperti kita ketahui, PNBPN telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Namun demikian, pengelolaan PNBPN masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat atau tidak disetor ke kas negara, penggunaan langsung PNBPN, dan PNBPN dikelola di luar mekanisme APBN,” papar Hafisz. ■ mh/mp

Komposisi Distribusi Gas di Semarang Belum Ideal

Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto menyoroti komposisi distribusi gas di wilayah Semarang yang menurutnya belum ideal. Pasalnya untuk pemakaian rumah tangga baru sekitar 10 persen, sedangkan kawasan industri mencapai 90 persen.

Hal tersebut diutarakannya saat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meninjau fasilitas Cluster Compress Natural Gas (CNG)

Tambak Aji Semarang yang dilanjutkan pertemuan dengan Direksi PT. PGN Tbk, Perwakilan Dirjen Migas, Perwakilan BPH Migas dan Perwakilan SKK Migas di Kantor PT. PGN Tbk Sub Sektor Distribusi Wilayah II Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/7).

“Ke depan, komposisi distribusi gas ini perlu diperhatikan asas keadilan bagi masyarakat agar bisa menikmati energi murah dan ramah lingkungan,” harap politisi PDI- Perjuangan ini.

Daryatmo mengingatkan pihak Direksi PGN khususnya wilayah Semarang, jangan

sampai kebutuhan gas rumah tangga terkalahkan oleh kepentingan kalangan industri dengan pendekatan-pendekatan bisnis.

“Kepada PGN khususnya dan kementerian pada umumnya, kita akan meminta agar memetakan seluruh rangkaian pipa dalam distribusi gas alam. Nanti terlihat wilayah mana yang sudah terpasang jaringan gas dan mana yang belum akan terus diperluas jaringannya,” imbuhnya.

Dirinya melihat Jawa Tengah memerlukan dorongan kembali agar konsumsi dan distribusi gas tidak kalah dibandingkan wilayah lainnya, seperti Jawa Timur dan Jawa Barat yang sudah lebih dahulu bisa menikmati gas melalui

jaringan pipa-pipa gas (Jargas).

“Infrastruktur jaringan gas ini sebenarnya sudah ada sejak jaman Belanda. Hanya dalam beberapa dekade tidak menjadi perhatian pemerintah secara serius. Rumah saya di Ambarawa masih ada bekas pipa gas era Belanda,” sambung Daryatmo mengungkapkan sejarahnya.

Sementara itu, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo mengakui bahwa distribusi gas saat ini untuk wilayah Semarang, rinciannya penjualan gas industri mencapai 7940 M3/day dan rumah tangga hanya 560 M3/day dengan total jumlah pelanggan 1.265 pelanggan.

“Dengan Jargas yang tanpa subsidi, bisa menghemat biaya sekitar 50 persen ketimbang penggunaan elpiji tabung subsidi, yang ditujukan untuk golongan masyarakat menengah ke bawah,” jelas Dilo Seno.

Pihaknya juga terus berupaya memperluas jaringan gas untuk pemakaian rumah tangga dengan melihat besarnya potensi *demand* (permintaan) pengguna SPBG di Semarang. Komposisi distribusi akan sangat dipengaruhi oleh perluasan pembangunan jaringan gas di masa mendatang. ■ oji/sf



Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto beserta Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau Cluster CNG Tambak Aji, Semarang.

Foto: Odiye/hr



Foto: Rian/hr

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau lokasi Gumuk Pasir, DI Yogyakarta

Gumuk Pasir Miliki Potensi Wisata

Gumuk pasir adalah gundukan pasir yang berasal dari gunung berapi, yang terjadi karena adanya angin dari Samudera Hindia selama ribuan tahun, dan berfungsi sebagai benteng awal untuk menahan laju tsunami. Lokasi keberadaan Gumuk Pasir sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai obyek wisata.

Namun potensi wisata tersebut harus didukung dengan sikap peduli dari masyarakat di sekitarnya dalam menjaga lingkungan. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung usai meninjau lokasi Gumuk Pasir di daerah Parangtritis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Gumuk Pasir merupakan salah satu potensi alam ini harus disyukuri. Adapun bentuk implementasi rasa syukur itu yakni dengan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Pengeloalannya harus dioptimalkan. Agar keindahan Gumuk Pasirnya dapat benar-benar terlihat,” ujar Tamsil, di Yogyakarta, Jum’at (20/7).

Namun fakta yang ditemukan di lapangan masih tidak sesuai harapan, sambung Tamsil. Menurutnya hal itu karena ada faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya keindahan dari Gumuk Pasir itu. Diantaranya adalah akibat adanya pepohonan yang sengaja

ditanami di atasnya.

Selain itu juga, kondisinya masih kelihatan agak kumuh, karena ada peternakan ayam di sekitarnya. Hal inilah yang harus kita benahi,” tandas politisi PKS itu.

Tamsil menegaskan, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta badan yang mengelolanya harus mampu menunjukkan komitmennya yakni dengan mengupayakan secara sungguh-sungguh agar keaslian dan kelestarian Gumuk Pasir bisa terjaga dengan baik.

“Yang masih menjadi alasan klasik adalah masalah anggaran. Oleh karenanya, Komisi VII siap untuk memberikan komitmennya, asalkan pihak-pihak terkait juga berkomitmen untuk hal ini,” ucap Tamsil.

Dikatakannya, Gumuk Pasir sendiri sangat potensial untuk dijadikan sarana edukasi dan pelatihan bagi siswa dan guru, khususnya guru bidang pelajaran geografi. Saat ini tercatat bahwa angka kunjungan

masyarakat ke lokasi Gumuk Pasir baru mencapai jumlah 40 ribuan orang pengunjung. Tamsil menilai hal ini masih jauh dari batas memadai.

Dalam kesempatan ke Provinsi DIY itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI juga menyambangi Museum Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP), yang merupakan revitalisasi Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis. PGSP dibangun dengan tujuan untuk memperkenalkan informasi geospasial, terutama dalam bidang kepebisiran dan kelautan, dan berfungsi sebagai pusat restorasi dan konservasi gumuk pasir serta pengembangan museum gumuk pasir sebagai sarana pendidikan dan penelitian.

“Keberadaan Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP) memiliki peran penting dalam pengawasan pemanfaatan kawasan gumuk pasir. PGSP harus berupaya keras untuk menjaga kelestarian alam yang ada tersebut agar tidak hilang dan musnah. Hal ini yang harus kita maksimalkan. PGSP harus mampu membuat program-program yang menarik, agar potensi alam yang ada tersebut dapat menjadi satu potensi ekonomi, terutama ekonomi rakyat,” pungkasnya. ■ dep/sf

Revitalisasi Pendidikan Vokasi Guna Songsong Generasi Emas

Mencerdaskan kehidupan bangsa untuk tujuan kesejahteraan umum merupakan bagian dari pembangunan nasional, ini juga amanat dari Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, berbagai upaya dan kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto

Foto: Eho/hr

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto yang memimpin Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah menegaskan tentang pentingnya pendidikan vokasi guna menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Revolusi Industri 4.0, dan yang tak kalah penting adalah menyongsong Generasi Emas 100 Tahun Indonesia.

Setelah meninjau langsung ke SMK TEXMACO Semarang dan SMKN 8 Semarang, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, menghadapi MEA, Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi. Bekal yang harus disiapkan menghadapi Revolusi Industri 4.0 tidak cukup hanya keterampilan dasar.

“Sumber daya manusia Indonesia harus memiliki keterampilan komunikasi, kritis dan kreatif, digital

literasi, keterampilan berpikir, tingkat keingintahuan yang tinggi, keterampilan interpersonal, multi kultural, multi bahasa, dan keterampilan menyelesaikan masalah,” papar Djoko di ruang pertemuan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (19/7).

Menurut Djoko, ada beberapa hal yang merupakan pendukung pendidikan vokasi yang berkualitas, yaitu kurikulum, ketersediaan guru kejuruan, ruang kelas, peralatan laboratorium yang memadai, serta akreditasi. Dia menjelaskan, kurikulum pendidikan vokasi dan teknologi pembelajaran pendidikan vokasi perlu dikembangkan lagi dalam berbagai bidang yang kontekstual dengan kondisi Indonesia seperti kemaritiman, pertanian, perbangkit listrik, dan lain-lain.

“Penguatan SMK sebagai Lembaga Pendidikan Vokasi perlu dilakukan melalui beberapa dimensi yaitu penguatan tata kelola kelembagaan melalui percepatan akreditasi sekolah dan sertifikasi, pembenahan kurikulum dan kualitas pembelajaran melalui penataan spektrum bidang keahlian serta peningkatan magang industri,” jelas Djoko. ■ eko/mp

Pemerintah Harus Investigasi Perusahaan Penunggak PNBP

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyalahkan beberapa perusahaan tambang di Kalimantan Barat yang menunggak pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Imbasnya, PNBP di Kalbar belum optimal. Dari 207 perusahaan yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), hanya setengahnya yang aktif membayar pajak.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan (kanan)

Foto: erlangga/hari

“ Kita lihat di Kalimantan Barat ini penerimaannya sudah mencapai Rp105 miliar. Tetapi kalau kita lihat dari 207 perusahaan yang punya IUP, yang aktif membayar hanya setengahnya saja. Belum semua dan ini menjadi pertanyaan,” ujarnya di sela-sela memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Pontianak, Kalbar, Jumat (20/7).

Marwan meyakini bahwa perusahaan pemilik IUP yang belum membayar PNBP ini sudah tidak aktif. Maka dari hal tersebut, ia meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan secepatnya melakukan investigasi agar semuanya menjadi jelas.

Selain itu, politisi Partai Demokrat ini juga meminta agar para pelaku bisnis tidak

Komisi XI Terima Masukan Revisi UU PNBP

Komisi XI DPR RI menerima berbagai masukan baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta terkait Revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) saat kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Kelak masukan tersebut akan dikaji sebagai bahan pertimbangan guna merampungkan Revisi UU PNBP.

Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan masih ada beberapa persoalan terkait mekanisme penarikan PNBP. Termasuk ada beberapa celah yang memberikan peluang kepada para pengusaha untuk melakukan beberapa kegiatan yang bisa merugikan penerimaan negara dari sektor PNBP.

“Celahnya harus kita tutup rapat-rapat. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi yang jelas terkait regulasi antar pengelola PNBP baik di tingkat kementerian dan lembaga, serta di

merasa terbebani dengan adanya PNBP ini. Sejauh ini banyak keluhan terjadi dikarenakan pelaku bisnis merasa terbebani dengan kehadiran PNBP, sehingga mereka harus lebih efisien memanfaatkan tenaga kerja.

“Kita ingin melihat bagaimana PNBP ini optimal, tetapi juga tidak mematikan kesempatan berusaha. Karena kesempatan berusaha ini penting dalam rangka untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan juga dapat mengurangi kemiskinan. Jadi para pengusaha ini harus bisa membantu pemerintah dalam mencapai tujuan negara,” tutur Marwan.

Politisi dapil Lampung II itu juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah bersama DPR RI sedang berusaha merampungkan revisi Undang-Undang mengenai PNBP, sehingga penting bagi pihaknya melakukan kunjungan kerja ini untuk mengetahui aktualisasi yang terjadi di lapangan, agar dapat menjadi acuan dalam penyelesaian UU tersebut. ■ eps/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara

Foto: Erman/hr

lingkup Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara,” ujar Amir di sela-sela pertemuan dengan mitra kerja terkait, di Balikpapan, Kaltim, Jumat (20/7).

Politisi PPP itu berharap dengan adanya UU PNBP yang baru nantinya akan ada sinkronisasi dengan turunannya melalui peraturan pemerintah (PP). Setiap PP yang akan keluar agar dibicarakan dan dibahas bersama Komisi XI dengan pihak pemerintah. Kelaknya semua turunan dari UU PNBP akan betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan isi dari regulasi itu.

Menurutnya, sasaran dari penetapan dan perubahan UU PNBP dari sisi *government* akan menjadi sebuah regulasi yang bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian dari sisi penerimaan, dengan diundangkannya regulasi PNBP yang baru, maka penerimaan negara bisa berlipat ganda.

“Kita berharap jangan sampai dengan adanya UU ini pembebanan kepada masyarakat malah semakin tinggi. Tapi intensifikasi yang kita

harapkan adalah penerapan peraturan perbaikan-perbaikan saat ini masih banyak *loosed*, masih banyak *mised* di lapangan. Kalau misalnya dibenahi betul-betul, maka bisa menghasilkan sebuah penerimaan yang maksimal,” terangnya.

Menurutnya, dari kunjungan kerja ini berpeluang memberikan masukan terkait dengan proses-proses dalam pembahasan RUU PNBP. Sehingga ini juga menjadi sebuah referensi buat Komisi XI DPR RI dalam menetapkan dan membicarakan masalah PNBP yang sudah masuk dalam masa finalisasi ini.

“Targetnya bagaimana kita meningkatkan penerimaan negara melalui PNBP. Selama ini kita lihat potensinya sangat besar, tetapi realisasinya masih sangat kecil. Melalui UU PNBP yang baru ini, diharapkan penerimaan negara makin membaik. Karena selama ini sektor PNBP ini hanya menyumbang sekitar 19 persen dari total penerimaan negara,” pungkas politisi dapil Sulawesi Selatan ini. ■ es/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah memimpin Tim Kunker meninjau SMKN 4 dan SMKN 5 Denpasar

Indonesia Harus Siapkan SDM Berstandar Kompetensi

Indonesia harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI ke SMKN 4 dan SMKN 5 Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (19/7), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah menyebutkan, beberapa kendala yang dihadapi siswa-siswi dalam pendidikan.

“Khususnya, karena SMK ini pendekatannya berbeda dengan SMA, banyak praktik, sehingga dalam hal pembiayaan dan kebutuhannya juga berbeda. Dalam anggarannya pun juga seharusnya berbeda,” jelas Hetifah saat memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau SMKN 4 dan SMKN 5 Denpasar dan bertemu dengan Pemerintah Provinsi Bali di kantor Gubernur Bali.

Hingga saat ini, Hetifah menyebutkan bahwa anggaran untuk siswa-siswi di

SMKN 4 dan SMKN 5 Denpasar, memang masih terbatas. Akan tetapi, walaupun masih dengan keterbatasan anggaran, inovasi telah banyak dilakukan, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas.

“Bukan saja kurikulumnya, tetapi juga kepada sikap, bukan hanya pengetahuan saja. Kemudian juga bagaimana mereka benar-benar digembleng untuk siap kerja,” ungkap anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Hetifah menyebutkan ada beberapa

hal yang perlu ditingkatkan dan lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bali. “Yang perlu ditingkatkan yaitu pertama mengenai kurikulum, supaya semakin sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar apalagi kita sudah memasuki era digital dan revolusi industri generasi keempat,” papar Hetifah.

Hal penting lainnya adalah bagaimana memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini bisa mengikuti kemajuan zaman, baik murid maupun dari tenaga pengajarnya sendiri. “Guru adaptif dan produktif harus dapat lebih ditingkatkan,” tambah Hetifah.

Masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, seperti banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum terserap, sementara murid-murid



Foto: Ica/hari

Komisi X Apresiasi Sarpras SMK Padang

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memiliki nilai ekonomis. Hal itu menjadi fokus Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Sumatera Barat adalah pengawasan terhadap Sekolah Menengah Kejuruan - Sekolah Menengah Analis Kimia (SMK - SMAK) Padang.

Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menyatakan *surprise* melihat sarana dan prasarana pendidikan SMK- SMAK Padang yang luar biasa bagus serta para siswa dan siswinya yang sangat produktif.

“Kami bangga ternyata *output* atau lulusan dari sekolah ini langsung terserap pasar kerja, kami mendorong sangat progresif terhadap program pemerintah dalam rangka membangun SMK,” kata Reni saat memimpin Tim Kunker meninjau SMK- SMAK Padang, Sumatera Barat. Kamis (19/7).

Menurutnya, jumlah siswa SMK dan SMA hampir seimbang, karena SMK merupakan jenjang pendidikan yang memastikan bahwa lulusannya siap kerja. “SMK analis kimia padang lulusannya terserap di daerah kemudian di level nasional bahkan juga ke luar negeri, ini patut diapresiasi,” jelas politisi PPP ini.

dari SMK juga diharapkan untuk langsung siap di dunia kerja.

“Memang ini satu tantangan yang besar, bagaimana komitmen kita dimanifestasikan dalam bentuk anggaran. DPR juga harus terus melakukan pengawasan di lapangan sehingga benar-benar tahu apa yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan SMK, yang akan kami perjuangkan melalui pembahasan anggaran,” jelas Hetifah.

Hal lainnya yang juga menjadi penting, yaitu mengenai sosialisasi terhadap SMK. “Ada *image* yang terkesan kurang bergengsi bagi anak-anak yang bersekolah di SMK. Nanti, sedikit demi sedikit kita juga harus melihat banyak lulusan SMK yang juga berhasil dan menjadi tokoh-tokoh populer,” tambah Hetifah.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan bahwa masih perlu waktu untuk menunjukkan melalui praktik dan bukti-bukti, bahwa ternyata sekolah di SMK juga lebih bergengsi atau sama dengan sekolah di SMA. ■ *ica/mp*



Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI Reni Marlinawati memimpin peninjauan sarpras SMA - SMAK Padang

Foto: Arief/hr

Dia menambahkan, SMK ini sudah berdasarkan standar nasional yang ditetapkan, artinya *quality Insurance* yang dibangun di SMK ini sudah luar biasa baik. “Saya sangat bangga kepada Kepala Dinas Pendidikan Padang dan Kepala Sekolah atas proses belajar yang ada di SMK ini, ada sembilan skema yang di Analis Kimia tad sangat baik,” tegasnya.

Lebih lanjut Reni mengatakan, ketika pembangunan ditingkatkan ternyata memang belum seiring dengan kesiapan pendidik dan tenaga kependidikannya. Banyak SMK yang tidak seperti SMK - SMAK Padang, gedungnya bagus tetapi tenaga pengajarnya belum memadai, dan berbagai fasilitasnya kurang baik.

“Untuk itu, Komisi X fokus melihat langsung perbandingan bagaimana SMK yang sudah tertata berjalan baik dengan SMK- SMK berbagai daerah yang masih kurang. Memang SMK seperti ini baru ada di Padang, Makassar dan Bogor. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan mendorong pembangunan SMK- SMK sejenis dan untuk dijadikan *role model*,” tutupnya. ■ *rif/mp*

Baleg Setujui RUU BUMN Jadi Usul Inisitif DPR

Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan agenda pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyetujui RUU ini menjadi usul inisitif DPR RI.



Foto: Ojile/hr

Pimpinan dan Anggota Baleg menandatangani persetujuan draf RUU BUMN menjadi usul inisitif DPR RI

diberhentikan begitu saja oleh pemerintah melalui Menteri BUMN. Tetapi mereka punya hak untuk jawab, dan itu diatur dalam undang-undang,” ungkap Totok.

Dia juga menambahkan dalam RUU ini ada perlindungan untuk para direksi BUMN, sehingga ada rasa ketenangan bekerja. Menurut Totok, hal ini penting untuk perusahaan, yang sekarang kompetisi sedemikian sengit.

“Kalau para manajemennya, serta direksi itu tidak ada kepastian hukum dan tidak ada perlindungan hukum, siapa yang mau mengabdikan di BUMN. Maka undang-undang ini memasukkan klausul bahwa seorang direksi apabila diberhentikan sebelum masa jabatannya, maka dia punya hak jawab. Itu yang sebelumnya tidak ada,” jelas Totok.

Selain itu, politisi dapil Jatim ini memaparkan bahwa UU dengan tegas menetapkan setiap direksi dan komisaris itu adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang yang sesuai dengan perusahaan. Soal bagi-bagi posisi dalam komisaris BUMN, Totok menilai agak sulit dihindari.

“Terutama direksinya harus memiliki kompetensi di bidangnya, dan dia kerja penuh waktu. Soal bagi-bagi itu menurut saya agak sulit untuk direksi. Tapi kalau komisaris kelihatannya masih dimungkinkan bisa terjadi,” ungkap Totok. ■ eko/sf

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto, dengan pihak pengusul Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Gunanduto, di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (24/7).

“Saya minta persetujuan dari rapat pleno Badan Legislasi ini. Apakah draf rancangan dari acara harmonisasi ini, dapat kita setujui untuk kita sahkan?” tanya Totok, peserta rapat pun menjawab ‘setuju,’ yang disambut ketukan palu pimpinan sidang menandakan keputusan persetujuan.

Seluruh fraksi di DPR RI kecuali Fraksi PKS, telah menyerahkan dan menyatakan draf persetujuan RUU BUMN yang akan dibawa ke Rapat Paripurna, diusulkan menjadi RUU inisitif DPR. Meskipun F-PKS belum menyerahkan drafnya, namun Totok menjamin F-PKS pun ikut menyetujui.

“Dari PKS walau tidak ada tertulisnya, tapi sejauh dari seluruh pembahasan di Panja tidak ada keberatan juga, saya kira pada dasarnya juga setuju,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dia juga menjelaskan Baleg selama ini telah melakukan pengharmonisasian dan pembulatan konsep, supaya di antara pasal dengan pasal lain tidak terjadi tabrakan, selain itu sanksi-sanksi dalam RUU ini disesuaikan dengan KUHP.

Menurut Totok, dalam RUU ini ada kemajuan, yakni direksi BUMN akan menjabat selama lima tahun (satu priode) dan tidak dapat diberhentikan secara serta merta.

“Di RUU ini ada beberapa kemajuan, dari mana direksi itu tidak serta merta bisa

BAKN DPR Rekomendasikan Perlunya Pembinaan Dalam Penggunaan Dana Desa

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta agar pencairan Dana Desa yang ditransfer ke daerah melalui desa khususnya di Provinsi Jawa Tengah, tidak hanya dilakukan pengawasan saja. Namun yang lebih penting dari pelaksanaan tersebut adalah dilakukannya pembinaan cara penggunaan dan pelaporan Dana Desa tersebut.

Hal itu terungkap saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan Gubernur Jawa Tengah dan Perwakilan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) RI Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/7).

“Kami merekomendasikan transfer Dana Desa supaya berjalan baik dan benar serta sesuai dengan yang diinginkan, bukan

BURT DPR Harapkan RS Charitas Palembang Berikan Pelayanan Optimal

Tim Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dipimpin Wakil Ketua Nurhayati Monoarfa meninjau Rumah Sakit RK. Charitas Palembang, Sumatera Selatan, Senin (16/7). Menurut Nurhayati, dengan kunjungan BURT DPR RI ke RS *provider* ini diharapkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dapat lebih tersosialisasi dengan baik.



Foto: eka/hr

Tim BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua Nurhayati Monoarfa meninjau Rumah Sakit RK. Charitas Palembang

Selain itu, PT. Asuransi Jasindo melalui rumah sakit *provider*-nya diharapkan dapat memastikan bahwa program jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan secara optimal dan sesuai peraturan yang berlaku.

Politisi PPP ini menegaskan, RS yang ditunjuk Jasindo oleh penyelenggara Jamkestama ini yang memang sudah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 68

Tahun 2014 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim, MK, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat tertentu.

Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan oleh Jasindo yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK/02/2014, dan Permenkes Nomor 5 tahun 2014. "Jadi memang Jasindo ini yang ditunjuk pemerintah secara resmi untuk melayani

kami," jelas Nurhayati.

Ditambahkan, kunjungannya kali ini karena banyaknya komplain dari Anggota maupun dari keluarga Anggota DPR RI bahwa pada saat ke RS fasilitas maupun cara penerimaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terutama keluarganya, masih banyak yang mengalami kesulitan apabila datang ke RS yang walaupun sudah di tunjuk Jasindo sebagai *provider*.

"Kami ingin melihat dan menanyakan langsung bagaimana prosesnya pelayanan kepada anggota DPR maupun keluarganya, dari awal sampai selesai pengobatan," tegas politisi dapil Jabar XI itu.

Anggota BURT DPR RI Refrizal (F-PKS) menyatakan, kunjungan ke RS Charitas ini untuk memastikan pelayanan kepada anggota DPR dan keluarganya. Pihaknya menerima laporan RS ini tidak melayani Jasindo bahkan hanya dijawab, hanya melayani kesehatan untuk orang miskin atau BPJS Kesehatan.

Kejadian yang sama di dalamnya, petugas RS tidak mengenal kartu Jamkestama yang kenal hanya kartu BPJS, namun kemudian Direktur RS minta maaf untuk kejadian ini. "Jadi betul terjadi, karena ada kesalahpahaman manajemen RS dengan Jasindo," ujarnya

Anggota BURT DPR RI Irma Suryani Chaniago (F-NasDem) mengatakan, RS Charitas merupakan RS terbaik di Sumatera Selatan dan kelengkapannya sudah cukup bagus bahkan bisa dibilang tidak kalah dengan RS di Jakarta. Anggota dewan yang berkunjung ke sini dari dapil Sumsel pun merasa nyaman berobat di RS tersebut.

"RS Charitas sudah cukup besar seperti di Jakarta. Fasilitas cukup bagus bahkan ada fasilitas yang di Jakarta yang tidak ada, contohnya meditasi kemudian IICP. RS di Jakarta tidak punya IICP," sebut Irma.

Sementara itu, Anggota BURT DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie (F-PG) menjelaskan, sebagai mitra DPR asuransi Jasindo memfasilitasi untuk meng-cover kesehatan Anggota Dewan sudah berjalan bagus, terjalin komunikasi yang baik antara Jasindo dengan RS. Walaupun ada anggota yang kehilangan kartu, itu tidak masalah karena sistemnya sudah *online*.

"Sudah ada dokumen Anggota DPR RI dan keluarganya, sehingga bisa dilayani oleh seluruh RS *provider* Jasindo," katanya menambahkan. ■ hr/mp



Foto: Andri/hr

Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo

hanya masalah pengawas saja. Melainkan yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana pembinaan dari pihak yang berwenang agar sistem laporan pertanggungjawaban Dana Desa tepat waktu dan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan negara," jelas Andreas.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, pelaksanaan pengucuran anggaran Dana Desa tersebut diharapkan juga bisa diikuti dengan petunjuk teknis (juknis) bagi para kepala desa sebagai pengelola anggaran tersebut. Karena selama ini menurutnya, transfer Dana Desa tersebut tidak diikuti dengan juknis dan pembinaan kepada kepala desa.

Untuk itu, Andreas menekankan, dengan rumitnya penggunaan anggaran Dana Desa tersebut, masalah pembinaan para kepala desa ini belum memahami sistem pelaporan penggunaan Dana Desa tersebut.

"Maka dari itu kita harus duduk bersama guna mencari solusi dan kebijakan apa yang tepat untuk mengelola keuangan atau transfer Dana Desa dari pusat tersebut," tandas politisi dapil Jawa Timur itu. ■ man/sf



Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing memimpin Tim Kunker BURT DPR RI ke RS Budi Kemuliaan Batam, Kepulauan Riau

Foto: Rumi/hr

Fasilitas RS Budi Kemuliaan Batam Cukup Memadai

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing memimpin Tim BURT DPR RI meninjau pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Utama (JAMKESUMA) bagi anggota DPR dan keluarganya di Rumah Sakit (RS) Budi Kemuliaan Batam, Kepulauan Riau, Jumat (20/7).

Anthon menilai fasilitas yang ada di RS ini cukup memadai dan bisa menjadi contoh bagi RS lainnya. RS yang berdiri tahun 1990 ini adalah RS pertama di wilayah Batam.

“Tidak hanya fasilitas yang baik, RS ini pun menangani pasien penyakit HIV/AIDS, karenanya saya mengimbau masyarakat bisa berobat di RS ini,” ujarnya usai meninjau beberapa fasilitas.

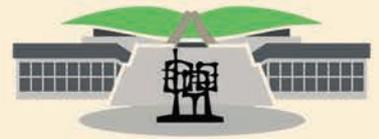
Untuk itu, politisi Partai Golkar ini mengatakan, akan kembali ke RS ini lagi untuk melihat bagaimana tindak lanjut kerja sama RS Budi Kemuliaan dengan PT Jasindo sebagai *provider*.

“Seperti kita lihat fasilitas rumah sakit di sini sudah memadai seluruhnya, seperti umurnya yang sudah menunjukkan kematangan 28 tahun,” ucap politisi daerah pemilihan Sumatera Utara III itu.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan RS Budi Kemuliaan Batam Sri Rezeki Sudarsono, berterima kasih dengan kedatangan BURT DPR RI. “Saya senang dengan kehadiran ibu-bapak Anggota Dewan, yang diharapkan bisa memberikan solusi dan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang ada,” harapnya

Dijelaskan, di RS ini siapapun pasien yang datang ke sini baik yang mampu ataupun tidak, tidak pernah ditolak. Pasalnya pasien kurang mampu masih cukup banyak hampir 50 hingga 60 persen yang dibantu. Di RS lain, ada pasien yang tidak mampu ditolak dan tidak ditangani, hingga akhirnya meninggal dunia karena mereka melakukan pembayarannya dengan BPJS.

“Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan untuk memberikan jalan terbaik. Pembayaran oleh para pasien yang tidak mampu yang hingga sekarang masih belum lunas,” pungkasnya. ■ rni/mp



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melantik Fadel Muhammad (F-PG) dan Hasrul Azwar dari (F-PPP) sebagai Pimpinan BKSAP DPR RI. Foto: Odjie/hr



Komisi VIII DPR dipimpin Wakil Ketua Ace Hasan Sadzily RDP dengan Kepala dan Dewan Pengawas BPKH. Foto: Arief/hr



Banggar DPR RI dipimpin Ketua Azis Syamsuddin rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Foto: Kresno/hr



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

mau motor jaman now? IKUTI LOMBA KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY

MEME (gambar, karikatur, video)

ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA: 19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018

PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: MOTOR JAMAN NOW

Juara I Rp 10 juta, Juara II Rp 7 juta, Juara III Rp 5 juta

SAAT PENGUMUMAN
DILANGSUNGKAN
LOMBA STAND UP COMEDY

KIRIM KE:



lombakritikterbaikDPR@gmail.com



lombakritikterbaikDPR@yahoo.com



[@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)



[@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)



[@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)